

GERTAK PANGKEP (Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan)

*Sebuah gerakan percepatan
kepemilikan identitas kependudukan di
wilayah kepulauan*



BENTUK

“GERTAK adalah sebuah Gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 17 Mei 2017, GERTAK lahir sebagai wujud Komitmen berbagai pihak untuk melakukan langkah langkah percepatan kepemilikan identitas Kependudukan terutama bagi 4 kecamatan yang berada di wilayah kepulauan. GERTAK adalah merupakan payung dimana didalamnya terdapat beberapa bentuk kegiatan layanan Adminduk yang bertujuan mempercepat cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat pulau yang secara geografis sulit untuk datang mengurus dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kabupaten karena jarak dan biaya transportasi yang mahal. Oleh Karena itu pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan pelayanan jemput bola melalui GERTAK.

Beberapa bentuk Layanan adminduk dibawah payung GERTAK antara lain (1) Pekan Layanan Adminduk Keliling Pulau (2) Pelayanan Terpadu Adminduk (3) Adminduk Night Service pada Kegiatan Pameran dan Pasar Malam (3) APATAK (Aksi Penjaringan Anak Tanpa Akta Kelahiran)

LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Kepemilikan dokumen identitas hukum seperti KTP elektronik, akta kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan lain lain sangat terkait dengan kesempatan melanjutkan pendidikan, pemanfaatan layanan kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Sementara itu, banyak orang miskin dan kelompok rentan yang tidak memiliki identitas hukum, karena berbagai faktor seperti lokasi bermukim yang berada jauh dari pusat layanan di Kabupaten, akses transportasi yang sulit dan relatif mahal untuk mendapatkan layanan kependudukan, akibatnya mereka menemui kesulitan untuk mengakses layanan dasar.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terdiri dari 13 (Tiga Belas) kecamatan, dimana 9 (sembilan) kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 (empat) kecamatan terletak di wilayah kepulauan, dengan jumlah desa/kelurahan 103. Luas wilayah dengan geografis yang menantang membuat Pemerintah Daerah menemui banyak tantangan dalam memenuhi hak atas identitas hukum warganya. Sebagai contoh masih ada 49.557 ribu warga Pangkejene dan Kepulauan yang belum melakukan perekaman KTP el. Termasuk

juga masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki Akta Nikah, Akta Kelahiran terutama yang bermukim di kecamatan pulau.

PIHAK TERLIBAT

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Kesehatan
- Kementerian Agama
- Pengadilan Agama
- 13 Pemerintah Kecamatan
- 163 Pemerintah desa/Kelurahan
- Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI)
- PGRI
- Sekolah
- Organisasi Masyarakat Sipil
- Masyarakat

DAMPAK

a. Perubahan dalam Pendekatan Pelayanan

Sebelum gerakan ini dilaksanakan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil hanya memberikan pelayanan di kantor kabupaten dengan menunggu masyarakat datang mengurus administrasi kependudukan. Setelah pencaangan gerakan paradigma pelayanan telah bergeser menjadi pelayanan jemput bola dimana kalau selama ini masyarakat datang ke kantor Dukcapil mengurus keperluan administrasi kependudukan, dan sekarang dibalik dinas Kependudukan dan pencatatan sipil akan datang ke kecamatan dan desa memberikan pelayanan langsung baik secara online maupun offline. Setiap kecamatan ditargetkan 15 hari pelayanan dari desa ke desa.

b. Perubahan Mindset /paradigm pelayanan

Selama ini masyarakat nanti mau mengurus administrasi kependudukan apabila dibutuhkan dan cenderung diurus secara mendadak bahkan melalui pihak ketiga sehingga relative tidak memiliki kesiapan lampiran berkas persyaratan. Dengan adanya gerakan ini maka terjadi perubahan mindset dimana Pihak Dukcapil akan memberikan seluruh dokumen kependudukan kepada masyarakat sebelum mereka membutuhkan karena sejatinya adalah identitas kependudukan adalah hak dari setiap masyarakat untuk mendapatkannya, dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya meskipun masyarakat pada saat ini belum memutuhkannya.

c. Peningkatan Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Semenjak GERTAK dicanangkan terjadi peningkatan cakupan kepemilikan identitas kependudukan pada awal GERTAK dicanangkan Mei 2017 Kepemilikan KTP el 49, 56 % dan pada januari 2018 telah meningkat menjadi 80 % demikian pula jangkauan untuk kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun telah meningkat dari 48,65 % pada bulan maret 2017 menjadi 74,84 % pada bulan Agustus 2017.

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan Pembangunan Kantor Baru pada tahun anggaran 2019

Berkat upaya dan kesungguhan dari seluruh pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan jemput bola melalui GERTAK untuk meningkatkan cakupan kepemilikan identitas kependudukan bahkan petugas lapangan disdukcapil terkadang sampai 20 Hari di pulau untuk memberikan pelayanan dari pulau ke pulau baru kembali ke darat.

Disisi lain kondisi kantor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkep sangat tidak refresentatif untuk memberikan pelayanan karena sempit dan masih menggunakan bangunan lama

Bupati memberikan perhatian penuh atas berbagai inisiatif layanan yang diberikan sehingga pada tahun anggaran 2019 Kantor Disdukcapil akan direhabilitasi total bangunan baru berlantai 2 lengkap dengan front office yang refresentatif dan nyaman

PROSES

Pada tanggal 6 April 2017 dalam FGD tentang pentingnya kepemilikan Identitas Hukum bagi masyarakat dan bagaimana peran desa dalam mendorong percepatan kepemilikan identitas hukum. Sejalan dengan visi misi Bupati bahwa 90 % Penduduk Pangkep harus memiliki identitas Kependudukan. Peserta diskusi sepakat untuk membuat sebuah gerakan percepatan kepemilikan identitas hukum yaitu Gerakan Desa Bebas Tuntas Administrasi Kependudukan dengan sasaran utama satu Kecamatan yang menjadi wilayah dampingan Kompak yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Pencanangan gerakan ini disepakati pada tanggal 10 Mei 2017 dengan melibatkan seluruh desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Peserta diskusi sepakat pada waktu pencanangan gerakan dilakukan secara langsung oleh Bupati Pangkep

Pada tanggal tanggal 10 April 2017 sebuah tim kecil yang terdiri dari Dr. Abdul Gaffar (DPMD) Hadayullah (Bappeda) Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan District Koordinator Pangkep melaporkan ke Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan inisiatif ini percepatan kepemilikan identitas kependudukan fokus di kecamatan dampingan KOMPAK.

Pada waktu melaporkan hal ini kepada Bupati. Bupati merespon sangat bagus tetapi pada saat itu Bupati minta kepada tim agar gerakan tuntas administrasi kependudukan ini bukan hanya satu kecamatan saja tetapi semua kecamatan dengan sasaran pertama yang akan dituntaskan 4 Kecamatan Pulau.

Pasca pertemuan konsultasi dengan Bupati, melalui fasilitasi dari Kompak dilakukan beberapa kali pertemuan antara lain pada tanggal 10 Mei 2017 untuk membahas persiapan pencanangan gerakan desa bebas Tuntas administrasi Kependudukan dengan melibatkan Disdukcapil, Kemenag, Pengadilan Agama, Pemerintah Desa dan Camat untuk mematangkan rencana pencanangan gerakan. Berdasarkan dinamika lapangan semula pencanangan gerakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017 atas saran dari berbagai pihak termasuk ketersediaan waktu dari pemerintah Pusat dan pemerintah daerah maka Pencanangan gerakan di Reschedule ke tanggal 17 Mei 2017.

Pada tanggal 17 Mei 2017 dilaksanakan pencanangan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan sesuai dengan visi misi Bupati Pangkep yaitu diberikan nama **“GERAKAN TUNTAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GERTAK)** Deklarasi ini dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep. Gerakan ini dicanangkan secara langsung oleh Wakil Bupati Pangkep yang diawali dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Kepala Desa Mattiyo Kanja yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Deklarasi sebagai bentuk komitmen untuk mensukseskan gerakan ini. Para Deklarator yang bertandatangan dipimpin langsung oleh wakil Bupati kemudian para Kepala OPD terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, DPMD, Kemenag, Pengadilan Agama, seluruh camat, APDESI dan Semua Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini merupakan bentuk kemitraan strategis antara berbagai pihak dalam rangka percepatan kepemilikan identitas kependudukan di Kabupaten Pangkep

Implementasi GERTAK dilaksanakan dalam berbagai bentuk layanan seperti (1) Pekan Layanan Adminduk Keliling Pulau (2) Pelayanan Terpadu Adminduk (3) Adminduk Night Service pada Kegiatan Pameran dan Pasar Malam (3) APATAK (Aksi Penjaringan Anak Tanpa Akta Kelahiran). Bentuk kegiatan ini rutin dilaksanakan dan sudah berlangsung selama 1 tahun

POTENSI REPLIKASI

GERTAK Pangkep berpotensi untuk direplikasi oleh kabupaten lain di Sulawesi selatan terutama untuk kabupaten yang memiliki tipikal keadaan geografis seperti Pangkep antara lain Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bulukumba. Gertak bukan hanya dapat dikembangkan di wilayah kepulauan tetapi juga di wilayah daratan.

Disdukcapil provinsi berpotensi untuk melakukan knowledge Sharing untuk memperkenalkan GERTAK pada 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan

Beberapa bentuk layanan sudah direplikasi ke kecamatan lain di wilayah daratan dan penguangan

PERKEMBANGAN TERKINI

Hingga saat ini implementasi GERTAK dalam bentuk berbagai kegiatan masih tetap dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBD. Dalam Proses selanjutnya telah direncanakan untuk menyusun Peraturan Bupati untuk mendukung pelaksanaan Gertak secara berkelanjutan. Pelayanan Terpadu Adminduk sebagai salah satu bentuk layanan dari GERTAK akan dibuatkan MOU antara Disdukcapil, Kemenag dan Pengadilan Agama agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat, sehingga akan lebih

memudahkan dalam melakukan advokasi anggaran untuk pelayanan terpadu melalui APBD

TANTANGAN

- Kondisi Geografis di wilayah kepulauan yang tidak setiap saat dapat dilaksanakan pelayanan GERTAK karena harus memperhatikan berbagai kondisi alam seperti cuaca, musim hujan. Ada waktu waktu tertentu semua orang akan berpikir untuk datang ke pulau karena tingginya gelombang laut.
- Biaya operasional untuk melaksanakan pelayanan di kepulauan cukup tinggi mulai dari biaya transportasi perahu, living cost staf pelayanan yang harus tinggal sehari-hari di pulau. Oleh karena itu perlu dukungan dari Pemerintah Desa melalui Dana Desa atau Alokasi Dana Desa
- Pelayanan di Pulau hanya bisa dilaksanakan secara off line karena tidak ada akses internet. Perekaman KTP el dilaksanakan secara manual setelah kembali ke darat kemudian diinput secara online

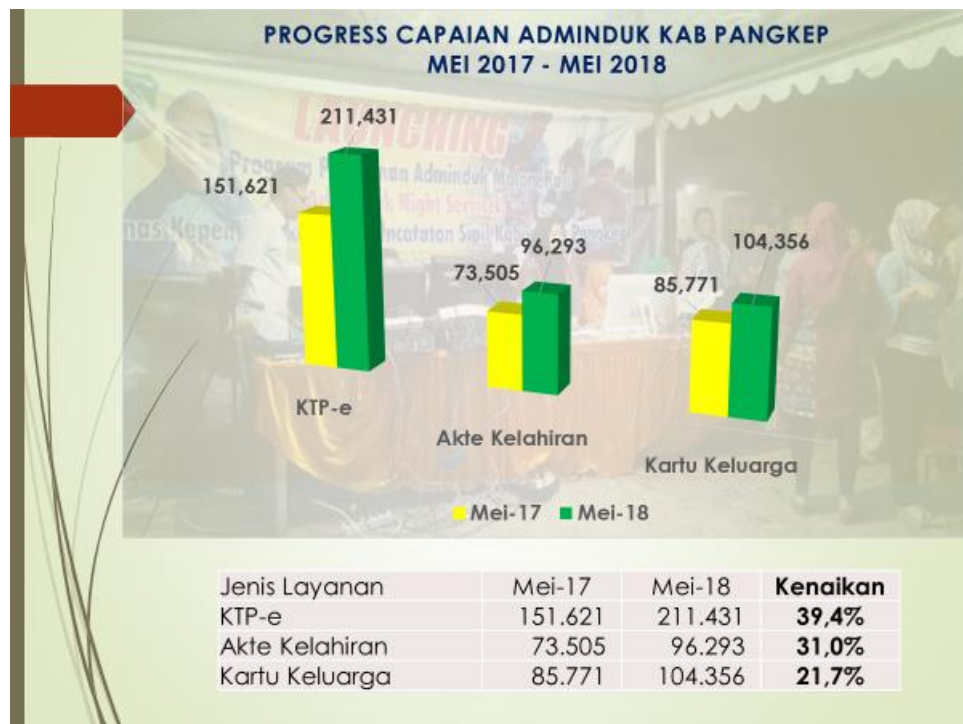


Foto -Foto Dokumentasi Pelaksanaan GERTAK dalam berbagai kegiatan layanan di Pulau